

DAFTAR ISI

Halaman

LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PENGESAHAN

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	7
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian	8
1.3.1 Maksud Penelitian	9
1.3.2 Tujuan Penelitian	10
1.4 Kegunaan Penelitian	11
1.4.1 Kegunaan Teoretis	11
1.4.2 Kegunaan Praktis	11
1.5 Kerangka Pemikiran	12
1.6 Metode Penelitian	17
1.6.1 Jenis Penelitian	17

1.6.2 Metode Pendekatan	18
1.6.3 Teknik Pengumpulan Data	18
1.7 Lokasi Penelitian	20
1.8 Sistematika Penulisan	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	23
2.1 Tinjauan Tentang Pidana	23
2.1.1 Pengertian Pidana	23
2.1.2 Tujuan dan Prinsip Pidana	27
2.2 Tinjauan Tentang Peraturan Daerah	32
2.2.1 Pengertian Peraturan Daerah	32
2.2.2 Tujuan dan Prinsip Peraturan Daerah	37
2.3 Tinjauan Tentang Penegakan Hukum	42
2.3.1 Pengertian Penegakan Hukum	42
2.3.2 Tujuan dan Prinsip Penegakan Hukum	48
2.3.3 Teori Penegakan Hukum	50
2.4 Tinjauan Tentang Pedagang Kaki Lima	53
2.4.1 Sejarah Inggris Tentang Pedagang Kaki Lima	53
2.4.2 Pengertian Pedagang Kaki Lima	55
2.4.3 Pedagang Kaki Lima dalam Perspektif Hukum	57
2.4.4 Hak-Hak Pedagang Kaki Lima	61
2.5 Penggunaan Jalanan Umum untuk Pedagang Kaki Lima Sebagai Tindak Pidana Pelanggaran	63
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	66
3.1 Hasil Penelitian	66
3.1.1 Gambaran Umum Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)	

Kabupaten Ciamis	66
3.1.2 Bentuk Penegakan Hukum Pasal 5 Ayat (4) Huruf F Jo. Pasal 40 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Ketertiban, Kebersihan, Dan Keindahan Terhadap Penggunaan Jalanan Umum Oleh Pedagang Kaki Lima Di Jalan Wage Rudolf Supratman Ciamis	70
3.1.3 Faktor-Faktor Dari Kendala Dalam Upaya Penegakan Hukum Pasal 5 Ayat (4) Huruf F Jo. Pasal 40 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Ketertiban, Kebersihan, Dan Keindahan Terhadap Penggunaan Jalanan Umum Oleh Pedagang Kaki Lima Di Jalan Wage Rudolf Supratman Ciamis	75
3.1.4 Upaya-Upaya Yang Dapat Dilakukan Oleh Aparat Penegak Hukum Dalam Mengoptimalkan Penegakan Hukum Pasal 5 Ayat (4) Huruf F Jo. Pasal 40 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Ketertiban, Kebersihan, Dan Keindahan Terhadap Penggunaan Jalanan Umum Oleh Pedagang Kaki Lima Di Jalan Wage Rudolf Supratman Ciamis	78
3.2 Pembahasan	81
3.2.1 Bentuk Penegakan Hukum Pasal 5 Ayat (4) Huruf F Jo. Pasal 40 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Ketertiban, Kebersihan, Dan Keindahan Terhadap Penggunaan Jalanan Umum Oleh	

Pedagang Kaki Lima Di Jalan Wage Rudolf Supratman Ciamis	81
3.2.2 Faktor-Faktor Dari Kendala Dalam Upaya Penegakan Hukum Pasal 5 Ayat (4) Huruf F Jo. Pasal 40 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Ketertiban, Kebersihan, Dan Keindahan Terhadap Penggunaan Jalanan Umum Oleh Pedagang Kaki Lima Di Jalan Wage Rudolf Supratman Ciamis	85
3.2.3 Upaya-Upaya Yang Dapat Dilakukan Oleh Aparat Penegak Hukum Dalam Mengoptimalkan Penegakan Hukum Pasal 5 Ayat (4) Huruf F Jo. Pasal 40 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Ketertiban, Kebersihan, Dan Keindahan Terhadap Penggunaan Jalanan Umum Oleh Pedagang Kaki Lima Di Jalan Wage Rudolf Supratman Ciamis	89
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	97
4.1 Kesimpulan	97
4.2 Saran	98
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ciamis66

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1 Wawancara dengan Bapak Bagus Rio S., S.H. selaku Pejabat Fungsional Ahli Pertama Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ciamis
- Gambar 2 Wawancara dengan Bapak Yudi Brata Dwijaya, S.Sos., MM selaku Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat sekaligus Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ciamis
- Gambar 3 Wawancara dengan Bapak H. Edi selaku Pedagang Kaki Lima Es Sirop H. Edi di Jalan Wage Rudolf Supratman Kabupaten Ciamis.....

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Izin Penelitian dari Fakultas Hukum Universitas Galuh Ciamis kepada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ciamis
- Lampiran 2 Surat Izin Penelitian dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ciamis
- Lampiran 3 Surat Balasan Izin Penelitian dari Satuan Polisi Pamong Praja kepada Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Galuh Ciamis
- Lampiran 4 Surat Keputusan Bupati Tentang Penetapan Lokasi dan Waktu Berjualan bagi Pedagang Kaki Lima di dalam Kota Ciamis